

**PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, ASIMETRI INFORMASI,
MORALITAS APARAT PEMERINTAH DAN KETAATAN ATURAN
TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI
(Studi Kasus Pada SKPD Kab. Indragiri Hilir)**

Oleh :

Ichsan Randiza

Pembimbing : Kamaliah dan Yuneita Anisma

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail : Ichsanrandiza@gmail.com

*Effect Of Internal Control, Information Asymmetry, Morality Authorities And
Compliance Rules Against Cheating Trends In Accounting
(Case Study at SKPD district. Indragiri Hilir)*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of internal control, information asymmetry, morality, and observance of the rules of the tendency of cheating (fraud) accounting at SKPD Indragiri Hilir. This research is a quantitative research with empirical studies. Criteria respondents used in this research that is head and sub staff in the finance department of each regional work units (SKPD) which acts on the part related to the study variables. The samples are 87 respondents. Methods of data collection is done with a question consisting of five instruments using a Likert scale. Of the 87 question have been distributed, the number of question returned as much as 81 question and can be analyzed. The data analysis technique used is quality test data consisting of validity and reliability test, test the classical assumption of normality test, multicollinearity test, and test heterosketastisitas, and hypothesis testing consisting of multiple regression test, the coefficient determination, t test. The results showed that (1) internal controls effect the tendency o fraud accounting (2) the information asymmetry effect the tendency of fraud accounting, (3) the morality of government officials influence the tendency of fraud accounting (4) obedience rules affect the tendency of accounting and (5) internal control, information asymmetry, morality government and observance of rules effect the tendency of fraud accounting

Keywords : internal, information, morality, government, accounting.

PENDAHULUAN

Di zaman sekarang ini kejahatan dan pelanggaran adalah sesuatu hal yang sudah wajar yang sering dilakukan oleh masyarakat. Di Indonesia sendiri perkembangannya sampai saat ini semakin meningkat. Meskipun banyak hukum atau peraturan yang sudah di tegakkan, tetapi masyarakat di Indonesia masih ada yang melanggar dan tidak

menaati hukum dan peraturan yang berlaku (berbuat curang).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Untuk menghasilkan informasi keuangan

yang bermanfaat bagi para pemakai dan pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus disusun oleh personil yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi keuangan daerah dan sistem akuntansi agar terhindar dari salah pencatatan atau kecurangan akuntansi yang biasa disebut *Fraud*.

Teori *Fraud Triangle* yang dijabarkan Cressey (1953) dalam Tuannakotta (2007), menyatakan bahwa korupsi juga disebabkan karena adanya 3 faktor yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Kecendrungan kecurangan akuntansi juga dapat dipicu dan dipengaruhi oleh faktor perusahaan (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku kecurangan itu sendiri, menurut teori Gone dalam Petra (2013:22) terdapat empat faktor seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu: keserakahan (*greed*), kesempatan (*opportunity*), kebutuhan (*need*) dan pengungkapan (*exposure*). Kesempatan dan pengungkapan berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum). Faktor generik berhubungan dengan organisasi yang berbuat kecurangan dapat dipengaruhi asimetri informasi. Sedangkan keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut dengan faktor individual). Faktor individual berhubungan dengan perilaku yang melekat dari individu itu sendiri, dalam kaitannya faktor individu ini berhubungan dengan moralitas untuk melakukan kecurangan.

Berdasarkan hasil penelitian Wilopo (2006) ditemukan bahwa ketaatan akuntansi berpengaruh

terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Hal ini berarti semakin taat manajemen terhadap aturan akuntansi maka semakin rendah tindakan kecurangan akuntansi yang terjadi, ini dikarenakan aturan akuntansi itu menjadi pedoman bagi pembuat laporan keuangan untuk menghasilkan informasi yang handal bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil sebuah keputusan.

Di Provinsi Riau, aset daerah yang dikuasai pihak lain senilai Rp307,82 miliar. BPK menemukan adanya aset berupa tanah, gedung dan bangunan, mesin, serta kendaraan yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain (masyarakat, pensiunan, instansi vertikal, dan mantan anggota DPRD). Hal ini mengakibatkan Pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya, rawan disalah gunakan serta berpotensi menjadi sengketa. Kondisi ini dijumpai pada 16 objek pemeriksaan di 4 provinsi dan 12 kabupaten/ kota, di antaranya Kota Tebo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Riau. Selain itu, ditemukan juga penyimpangan administrasi yang terjadi pada 23 objek pemeriksaan. Permasalahan yang sering muncul adalah penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, antara lain:(BPK, 2014)

- Barang Milik Daerah yang telah diserahkan kepada masyarakat melalui hibah masih tercatat di kartu inventaris barang atau belum disertai surat keputusan penghapusan dari kepala daerah.
- Selain itu terdapat aset peralatan dan mesin yang rusak berat belum dilakukan penghapusan. Penatausahaan Barang Milik

Daerah belum memadai seperti inventarisasi aset belum dilakukan, kartu inventaris barang tidak didukung perincian barang, dan koding kodefikasi aset belum dilakukan.

- Di samping itu juga terdapat peminjaman Barang Milik Daerah tanpa menggunakan berita acara pinjam pakai. Kondisi ini di antaranya terjadi di Provinsi Riau, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Papua.

Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2014, dijelaskan bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2013 berada pada opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) artinya opini audit yang diterbitkan sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdapat beberapa objek yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun semester II tahun 2014, yaitu :

- Pelaksanaan Anggaran Pemilihan Umum pada Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Indragiri Hilir dan KPU Kota Pekanbaru Tahun 2013 dan 2014.
- Kinerja Penyediaan Air Bersih Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, PDAM Tirta Indragiri dan Instansi Terkait Lainnya di Tembilahan Tahun 2013 dan Semester I Tahun 2014.

Selanjutnya berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2014, di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2013 terdapat 3 kasus kelemahan sistem pengendalian intern di pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, yang terdiri dari 1 kasus tentang kelemahan akuntansi dan pelaporan, 1 kasus tentang kelemahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dan 1 kasus tentang kelemahan struktur pengendalian intern. Kasus SPI ini tergolong cukup banyak ini menandakan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya menetapkan SPI yang baik, dan pengaruh dari lemahnya SPI ini akan mengakibatkan tidak efektif dan efisiennya operasi yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga perancangan pengendalian internal di setiap lingkungan instansi pemerintah diharapkan nantinya mampu memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasi, kehandalan pertanggungjawaban, dan kepatuhan terhadap hukum sehingga akan menutup peluang terjadinya perilaku kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulasmi (2014) mengenai Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi Dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di PDAM Kabupaten Bangli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki arti bahwa semakin tinggi moralitas individu

yang dimiliki pegawai maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan juga akan semakin menurun. (2) Asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki arti bahwa semakin tinggi asimetri informasi, maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin meningkat, demikian juga sebaliknya. (3) Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki arti bahwa semakin rendah keefektifan sistem pengendalian internal, maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya.

Penelitian yang menjadi acuan peneliti yaitu Wilopo (2006) mengenai Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik Dan Badan Usaha Milik Negeri DI Indonesia. Dimana faktor-faktornya adalah (keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi, dan moralitas aparat terhadap kecenderungan akuntansi).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 2) Apakah terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 3) Apakah terdapat pengaruh moralitas aparat pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 4) Apakah terdapat pengaruh ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 5) Apakah terdapat pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi, moralitas aparat pemerintah dan ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1) Untuk menguji pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 2) Untuk menguji pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 3) Untuk menguji pengaruh moralitas aparat pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 4) Untuk menguji pengaruh ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 5) Untuk menguji pengaruh pengendalian internal, asimetri informasi, moralitas aparat pemerintah dan ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun manfaat dari penelitian ini : 1) Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman atau gambaran variabel yang mempengaruhi kecurangan dalam

laporan keuangan. 2) Manfaat akademis, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademi lainnya yang akan melaksanakan penelitian dengan kasus yang sama ataupun aspek lain dimasa yang akan datang. 3) Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan selain bahan masukan dan pertimbangan bagi SKPD Kabupaten Indragiri Hilir dalam menghindari kecurangan kecenderungan laporan keuangan, sehingga tidak salah dalam melakukan tindakan pengambilan keputusan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Dalam hukum pidana, kecurangan adalah kejahatan atau pelanggaran yang dengan sengaja menipu orang lain dengan maksud untuk merugikan mereka, biasanya untuk memiliki sesuatu/harta benda atau jasa ataupun keuntungan dengan cara tidak adil/curang. Kecurangan dapat dilakukan melalui pemalsuan terhadap barang atau benda. Dalam hukum pidana secara umum disebut dengan “pencurian dengan penipuan”, “pencurian dengan tipu daya/muslihat”, “pencurian dengan penggelapan dan penipuan” atau hal serupa lainnya.

SPAP No. 70 (2001: 316.2) menjelaskan bahwa faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam pelaporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak sengaja.

Secara harfiah fraud didefinisikan sebagai kecurangan, namun pengertian ini telah

dikembangkan lebih lanjut sehingga mempunyai cakupan yang luas. Istilah kecurangan menurut Tunggul (2012:189) diartikan sebagai penipuan di bidang keuangan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun pihak lain.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2001) dalam Wilopo (2006) menjelaskan definisi kecurangan ialah setiap tindakan akuntansi sebagai: Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pengendalian Internal

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001: 319), pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: (1) Keandalan laporan keuangan, (2) Efektifitas dan efisiensi operasi, serta (3) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Mulyadi (2002:171) pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi,

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses komprehensif yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses komprehensif yang dipengaruhi oleh manajemen untuk memberikan keyakinan yang memadai sebagai pedoman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum.

Menurut Mulyadi (2002:183) komponen-komponen pengendalian internal adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian
 - a. Integritas dan nilai etika
 - b. Komitmen terhadap kompetensi
 - c. Falsafah manajemen dan gaya operasi
 - d. Struktur organisasi
 - e. Dewan komisaris dan komite audit
 - f. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab
 - g. Kebijakan dan prosedur kepegawaian.
2. Penilaian risiko
 - a. Menetapkan risiko sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian struktur pengendalian internal untuk meminimalkan salah saji.

- b. Menilai dan bereaksi secara efektif terhadap risiko.
3. Aktivitas pengendalian
 - a. Pemisahan kewajiban yang memadai
 - b. Otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivitas
 - c. Dokumen dan catatan yang memadai
 - d. Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
 - e. Pemeriksaan independen atas pelaksanaan.
4. Informasi dan komunikasi
Tujuan informasi dan komunikasi akuntansi adalah untuk memulai, mencatat, pemroses dan melaporkan transaksi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva yang terkait.
5. Pemantauan
 - a. Pemantauan dilaksanakan secara periodik
 - b. Menilai kualitas intern.

Asimetri Informasi

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk pihak internal perusahaan itu sendiri. Pihak-pihak yang sebenarnya paling berkepentingan dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat) (Kusumastuti, 2012).

Salah satu kendala yang akan muncul antara agen dan prinsipal adalah adanya asimetri informasi (Rahmawati, 2012). Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana agen mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan prinsipal (Wisnumurti, 2010). Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan

informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi (Scoot, 2003). Kondisi ini memberikan kesempatan kepada agen menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. Asimetri informasi ini mengakibatkan terjadinya moral hazard berupa usaha manajemen untuk melakukan kecurangan akuntansi. Menurut Scott (2003:7-8), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection* yaitu jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. *Adverse selection* terjadi karena para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar. Dan mungkin terdapat fakta-fakta yang dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh prinsipal tersebut yang tidak disampaikan kepada prinsipal, sehingga muncul bias dalam pemilihan untuk mendapatkan pilihan yang tepat. Jadi *adverse selection* timbul akibat adanya informasi yang tersembunyi.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditor), sehingga manajer dapat melakukan tindakan

diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. *Moral hazard* adalah memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian awal yang akibatnya merugikan pihak lain. Dalam hal ini agent memanfaatkan ketidaktahuan prinsipal untuk menyajikan suatu laporan yang tidak sesuai perjanjian awal atau standar yang berlaku sehingga terjadilah *moral hazard*.

Moralitas

Menurut Kamus Bahasa Indonesia moral berarti ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatannya, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan bermoral adalah mempunyai pertimbangan baik dan buruk, berakhlak baik. Menurut Bertens (1993:7), moralitas (dari kata sifat latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan "moral", kita berbicara "moralitas suatu perbuatan" artinya segi moral suatu perbuatan baik atau buruk. Moralitas adalah sifat moral/keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moral adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif.

Istilah Moral berasal dari bahasa Latin. Bentuk tunggal kata moral yaitu *mos* sedangkan bentuk jamaknya yaitu *mores* yang masing-masing memiliki arti yang sama yaitu kebiasaan adat. Bila kita membandingkan dengan arti kata etika, maka secara etimologis, kata etika sama dengan kata moral karena

kedua kata tersebut sama-sama memiliki arti yaitu kebiasaan adat. Arti kata moral adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan yang membedakan hanya bahasa asalnya saja yaitu 'etika' dari bahasa Yunani dan 'moral' dari bahasa Latin. Moralitas (dari kata sifat Latin *moralis*) memiliki arti yang pada dasarnya sama dengan 'moral', hanya ada nada lebih abstrak. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Ketaatan Aturan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), taat artinya senantiasa tunduk atau tidak berlaku curang. Aturan menurut kamus bahasa Indonesia merupakan suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya diturut/aturan merupakan hasil perbuatan mengatur/cara yang telah ditetapkan agar dituruti. Akuntansi menurut Arens (2003:396) adalah proses pencatatan, pengklasifikasian kejadian-kejadian ekonomi dengan perlakuan logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap aturan akuntansi adalah:

1. Tanggung Jawab Profesi
2. Kepentingan Publik
3. Integritas
4. Kompetensi dan Kehati-hatian
5. Efektivitas
6. Kerahasiaan
7. Standar Teknis
8. Perilaku Profesional

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Instansi wajib LAKIP yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir berjumlah 29 SKPD yang terdiri dari Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor.

Sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat mewakili populasinya peneliti menjadikan seluruh operasi sebagai sampel (total sampling) dikarenakan jumlah populasi yang kurang dari 100 subjek.

Respondennya adalah kepala dan staf sub bagian keuangan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sampel tersebut dipilih dikarenakan kepala dan staf sub bagian keuangan bertanggung jawab terhadap hasil informasi akuntansi yang disediakan sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam hal ini peneliti mengirim masing-masing SKPD sebanyak 3 kuesioner yaitu 1 untuk kepala SKPD dan 2 untuk staff bagian keuangan di SKPD, sehingga total kuesioner yang dikirim adalah $3 \times 29 = 87$ kuesioner.

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sampel penelitian ini adalah kepala dan staff keuangan di SKPD di Kabupaten Indragiri Hilir.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan langsung meneliti objek melalui pengisian kuisioner. Sumber data primer diperoleh melalui penyebaran kuisioner yang diisi oleh kepala dan staff bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuisioner. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010:199). Pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner secara langsung kepada kepala dan staff keuangan di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi sampel dalam penelitian. Jenis skala yang digunakan untuk menjawab kuisioner masing-masing variabel yaitu dengan menggunakan skala likert

Metode Analisis Data

1. Uji Kualitas Data

Kualitas data yang dihasilkan dari pengguna instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reabilitas.

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Uji validitas digunakan untuk mengukur instrument penelitian yang telah diukur apakah sah atau tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas bertujuan untuk menguji kualitas kuisioner. Suatu instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2010:173). Uji validitas dihitung dengan menggunakan korelasi pearson (*Pearson Correlation*) yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Setelah dilakukan pengukuran dengan SPSS akan dilihat tingkat signifikan atas semua pertanyaan. Melihat validitas untuk masing-masing butir pertanyaan dalam kuisioner dapat dilihat dari nilai *correlated Item* atau membandingkan r hitung dengan r table, yaitu :

- a. Jika nilai $r_{hitung} > r_{table}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam angket berkorelasi signifikansi terhadap skor total (artinya item angket dinyatakan valid).
- b. Jika nilai $r_{hitung} < r_{table}$, maka item pertanyaan atau pernyataan dalam angket tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (artinya item angket dinyatakan tidak valid).

b. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2010:173). Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi jawaban responden atas seluruh butir pertanyaan atau pernyataan yang digunakan.

2. Uji Asumsi Klasik

Karena pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda (*multiple regression*), maka terlebih dulu dilakukan uji asumsi klasik

sebagai persyaratan dalam analisis agar data dapat bermakna dan bermanfaat. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas. dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat) mempunyai distribusi data yang normal atau tidak (Ghozali,2006:4). Uji normalitas dikatakan baik apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan statistik *Kolmogorov Smirnov*. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka – angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data – data yang digunakan. Jika ρ -value lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan jika ρ -value lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal (Ghozali,2006).

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melihat besarnya nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai toleransi (*tolerance value*). Kedua ukuran tersebut menunjukkan setiap independen (bebas) menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. Hasil uji multikolinieritas harus menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan memiliki nilai VIF antara 1-10 dan

nilai tolerance lebih dari 10% (0,1) agar bebas dari gejala multikolonearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah homoskeastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Homoskeastisitas terjadi jika variance dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain tetap, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2005:40) :

1. Jika ada pola tertentu pada grafik, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokadastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokadastisitas.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis

ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan

- Y = Kecenderungan
Kecurangan Akuntansi
- α = Konstanta
- $b_{1,2,3}$ = Koefisien regresi masing-masing X
- X_1 = Variabel Independen 1
(Pengendalian Internal)
- X_2 = Variabel Independen 2
(Asimetri Informasi)
- X_3 = Variabel Independen 3
(Moralitas Aparat)
- X_4 = Variabel Independen 4
(Ketaatan Aturan)
- e = Variabel Pengganggu
(*Error Term*)

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2)

bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis secara parsial digunakan Uji t. Uji t dilakukan untuk menguji apakah tiap-tiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, dan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki hubungan signifikan atau tidak

dengan variabel dependen secara individual untuk setiap variabel.

Dasar pengambilan keputusan pengujian adalah :

1. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak ada pengaruh yang signifikan), atau apabila tingkat $sig > \alpha$ 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut tidak berpengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (ada pengaruh yang signifikan), T tabel dilihat dengan derajat bebas = $n - k - 1$, atau apabila tingkat $sig < \alpha$ 0,05 maka secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Penelitian

Didalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai negeri sipil yang bekerja di SKPD Kabupaten Indragiri Hilir. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada pegawai yang bekerja di satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Analisis Data

Sebelum dilakukan pengujian data baik untuk deskripsi data penelitian maupun untuk pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis, maka perlu dilakukan uji

validitas dan reliabilitas data. Uji ini perlu dilakukan karena jenis data penelitian merupakan data primer.

Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan software SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation*. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid.

Tabel 4.4 Uji Validitas Variabel

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Kesimpulan
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	KKA1	0,737	0,219	Valid
	KKA2	0,730	0,219	Valid
	KKA3	0,626	0,219	Valid
	KKA4	0,686	0,219	Valid
	KKA5	0,675	0,219	Valid
Pengendalian Internal	PI1	0,607	0,219	Valid
	PI2	0,760	0,219	Valid
	PI3	0,704	0,219	Valid
	PI4	0,559	0,219	Valid
	PI5	0,644	0,219	Valid
	PI6	0,532	0,219	Valid
	PI7	0,560	0,219	Valid
Asimetri Informasi	AI1	0,619	0,219	Valid
	AI2	0,661	0,219	Valid
	AI3	0,816	0,219	Valid
	AI4	0,562	0,219	Valid
	AI5	0,818	0,219	Valid
	AI6	0,838	0,219	Valid
Moralitas Aparatur Pemerintah	MAP1	0,738	0,219	Valid
	MAP2	0,731	0,219	Valid
	MAP3	0,783	0,219	Valid
	MAP4	0,666	0,219	Valid
	MAP5	0,780	0,219	Valid
	MAP6	0,738	0,219	Valid
Ketaatan Aturan Akuntansi	KAA1	0,726	0,219	Valid
	KAA2	0,849	0,219	Valid
	KAA3	0,803	0,219	Valid
	KAA4	0,585	0,219	Valid
	KAA5	0,832	0,219	Valid
	KAA6	0,864	0,219	Valid
	KAA7	0,771	0,219	Valid

Sumber: pengolahan data spss 2015

Hasil Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah

melakukan uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6 maka kuesioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 4.5 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Kesimpulan
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	0,724	0,6	Reliabel
Pengendalian Internal	0,738	0,6	Reliabel
Asimetri Informasi	0,781	0,6	Reliabel
Moralitas Aparatur Pemerintah	0,841	0,6	Reliabel
Ketaatan Aturan Akuntansi	0,892	0,6	Reliabel

Sumber: pengolahan data spss 2015

Pengujian Asumsi Klasik

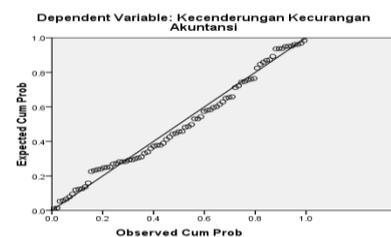
Uji asumsi klasik adalah pengujian pada variabel penelitian dengan model regresi, apakah dalam variabel dan model regresinya terjadi kesalahan. Pengujian asumsi klasik terdiri pengujian normalitas, multikolinearitas, dan pengujian heteroskedastisitas.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dan dengan melihat uji grafik, maka dapat disimpulkan bahwa data mempunyai distribusi normal.

Gambar 4.6 Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: pengolahan data spss 2015

Hasil Uji Multikolinearitas

Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Tabel 4.7 Hasil Uji Gejala Multikolinearitas

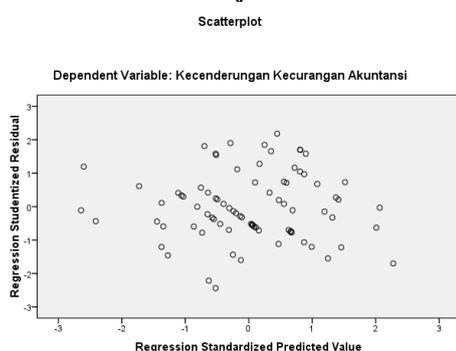
No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Pengendalian Intern	.824	1.213
2	Asimetri Informasi	.746	1.340
3	Moralitas Aparat Pemerintahan	.729	1.372
4	Ketaatan Aturan	.789	1.268

Sumber: pengolahan data spss 2015

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian asumsi heteroskedastisitas menyimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan kata lain terjadi kesamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Gambar 4.8 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: pengolahan data spss 2015

Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan variabel pengendalian intern (X_1), asimetri informasi (X_2), moralitas aparat pemerintahan (X_3), dan ketaatan aturan (X_4), dapat menjelaskan variabel Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kab Inhil.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 ^a	.659	.641	1.55238	2.089

a. Predictors: (Constant), Ketaatan Aturan Akuntansi, Asimetri Informasi, Pengendalian Internal, Moralitas Aparatur Pemerintah

b. Dependent Variable: Kecenderungan Kecurangan Akuntansi

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Tembilahan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $P_{value} < \alpha$. Variabel pengendalian internal memiliki $P_{value} 0,005 < 0,05$. Semakin tinggi pengendalian internal yang dimiliki pegawai maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang akan dilakukan juga semakin menurun.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Tembilahan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $P_{value} < \alpha$. Variabel asimetri informasi memiliki $P_{value} 0,000 < 0,05$. Jadi semakin tinggi asimetri informasi yang dimiliki pegawai maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang akan dilakukan juga semakin tinggi.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel moralitas aparat pemerintahan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Tembilahan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $P_{value} < \alpha$. Variabel moralitas aparat memiliki $P_{value} 0,000 < 0,05$. Jadi semakin tinggi moralitas yang dimiliki pegawai maka kecenderungan kecurangan akuntansi semakin menurun.

4. Hasil pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa variabel ketaatan aturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di SKPD Tembilahan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $P_{\text{value}} < \alpha$. Variabel ketaatan aturan memiliki $P_{\text{value}} 0,003 < 0,05$. Jadi semakin tinggi ketaatan aturan yang dimiliki pegawai maka kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan juga akan semakin menurun.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademisi yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel independen, yaitu pengendalian internal, asimetri informasi, moralitas aparat pemerintahan dan ketaatan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Alvin, A. Arens., J. Ronald., Beasley, Mark S. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*. Erlangga: Jakarta.

Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. 2013-2014. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan*

Keuangan Pemerintah kota Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2014 . Melalui www.bpk.com.

Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta : Gramedia.

Cressey Donald R.1953. *Others people money, A study in the social psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2001). *Standar Profesional Akuntan Publik*. Salemba Empat, Jakarta

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kusumastuti, Nur Ratri. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening*. Skripsi: Universitas Diponegoro.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2013-2014 Melalui www.bpk.com.

Mulyadi, 2008, *Auditing*, Salemba Empat, Jakarta.

Normadewi, 2014, *Pengaruh Keefektifan Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi dan Asimetri*

- Informasi pada Akuntabilitas Organisasi dengan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebagai Variabel Intervening (Studi empiris pada Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Bali), Tesis, Universitas Udayana, Bali.*
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 32/2004 dan nomer 17/2003; *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Keuangan Daerah*
- Petra, 2013, *Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi empiris Pemerintah Kota Sawahlunto), Jurnal, Universitas Negeri Padang, Padang.*
- Tuanakotta, Theodorus. M. 2007. *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif. Seri Departemen Akuntansi : FEUI.*
- Tunggal, Amin Widjaja. 2001. *Audit Operasional (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* AFABETA. Bandung
- Sulasmi, 2014, *Analisis Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi dan Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi di PDAM Kabupaten Bangli, Jurnal, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali.*
- Wilopo, 2006. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.* Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9. Padang, 23 – 26 Agustus 2006.